



KEPAHIANG

RABU, 01 MARET 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

643 Randis Nunggak Pajak Hampir Rp 1 M

KEPAHIANG - Tidak hanya kendaraan pribadi di Kabupaten Kepahiang yang menunggak pembayaran pajak. Lebih parah lagi, ratusan kendaraan dinas (randis) Pemkab Kepahiang tak dibayar pajaknya. Data UPTD Samsat Kepahiang, total 643 randis berupa mobil (R4) maupun sepeda motor (R2) menunggak pajak dengan nilai tagihan hampir Rp 1 miliar.

Kepala UPTD Samsat Kepahiang, Rionando, SH mengatakan, tunggakan ini bervariasi, ada yang dari Rp 100,000, 2013, dan ada yang baru ditunggak 1 tahun. Rincian, 121 unit R4 nilai tunggakan Rp 718 juta dan 545 unit roda dua, dengan nilai tunggakan Rp 245 juta.

Upaya agar pemegang randis membayar tunggakan yang riilnya sejumlah Rp 963 juta ini, Samsat Kepahiang sudah berkordinasi dengan OPD terkait. Bahkan sudah beberapa kali meminta langsung agar pajak tertunggak dilunasi. "Kami sudah melakukan penangan dan sosialisasi, dan itu kami lakukan setiap bulan. Bahkan kami menyampaikan itu per OPD. Karena kewajiban kita melakukan penagihan. Adapun kendala di masing-masing OPD yang menjadi alasan menunggak pajak, itu diluar

otoritas kami," ujar Rionando.

Dia juga telah menyampaikan kepada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, bahwa saat ini ada regulasi yang mengatur. Jika dalam dua tahun tidak melakukan pembayaran pajak setelah masa berlaku STNK lima tahun sekali habis, maka data kendaraan bersangkutan di Samsat, dihapus. Ini sesuai ketentuan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kondisi ini sudah saya sampaikan kepada BKD selaku yang punya otoritas terkait aset. Karena jika datanya sudah di hapus, maka kendaraan tidak bisa dilakukan pelelangan, sementara kendaraan masih tercatat dalam inventarisir aset," ungkapnya.

Hingga saat ini dikemukakan Rionando, belum ada regulasi yang mengatur kendaraan yang sudah dihapus datanya bisa dikembalikan lagi. Walaupun penghapusan data tersebut tidak semerta-merta dihapuskan secara otomatis. Harus ada pemberitahuan sebanyak tiga kali, dan pemberitahuan itu harus ditanggapi. Jika pemberitahuan ditanggapi, dan pemilik tidak ingin

data kendaraannya dihapuskan, maka penghapusan tak dilakukan. "Tapi y aitu tadi, kalau gak mau dihapus, bayar pajak kendaraanya. Kita harus bisa menyadari itu," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos., MM mengatakan, randis menunggak pajak bukan semerta-merta disengaja. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari OPD-OPD yang memiliki tunggakan pajak, alasan mereka karena kendaraan sudah tidak dapat lagi digunakan untuk menunjang operasional. Sudah tidak layak fungsi.

"Karena kendaraanya sudah tidak layak jalan, percuma pajaknya tetap dibayar. Makanya, kita mengimbau kepada OPD, kalau ada kendaraan yang sudah tidak bisa beroperasi lagi, agar dapat diusulkan dilelang," ujar Jono.

Namun, pendataan terhadap aset yang sudah tidak layak fungsi itu tidak kunjung dilakukan hingga saat ini. Akhirnya pajak kendaraan tersebut jadi membengkak. "Daripada nanti biaya operasionalnya lebih besar dari pada manfaat kendaraan tersebut, lebih baik segera kita lelang," ujarnya lagi.

Dia menambahkan, sebagian kendaraan yang menunggak karena kendaraan tersebut masih dikuasai oleh pengguna sebelumnya dan belum diserahkan lagi kepada OPD yang bersangkutan. "Kemungkinan juga ada kendaraan dinas tersebut masih dibawa oleh pegawai yang sudah tidak bekerja di OPD tersebut. Tentu, OPD itu berfikir jika kendaraan itu tidak di bawah kekuasaan mereka bagaimana mungkin membayar pajak kendaraan tersebut. Kendala seperti itu yang saya dengar dari OPD," papar Jono.

Jono kembali menegaskan kepada OPD-OPD yang tercatat masih menunggak pajak kendaraan untuk segera diselesaikan. Jika memang kendaraan sudah tidak dapat dimanfaatkan silakan didata dan sampaikan kepada Bagian Aset BKD Kepahiang untuk segera dilelang. Begitupun jika kendaraan masih dikuasai oleh pegawai yang sudah mutasi untuk secepatnya dilakukan penarikan.

Mengenai anggaran untuk pembayaran pajak randis, ditegaskan Jono bila tidak dimanfaatkan membayar pajak, maka anggaran yang sudah digelontorkan harus dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda). (eng)